

**Strategi Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai di Aceh Utara
Dalam program “Warung BLT”**

BLT Socializing Strategy in Northern Aceh on BLT Market
Program

Harinawaty dan Marfuah Yuni

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh Aceh dan Humas Pemda Gresik
Jalan Nologaten, belakang Ambarukmo Plaza Yogyakarta dan jl.nyai ageng arem-
arem 6/2 Gresik, Indonesia 61114

rinasyams@gmail.com

Abstract

The Impact of fuel rising by government policy has forces them to found some strategies to help the citizen, and one of them are BLT/BLS Program. Unfortunetely, these program has brings some protests from all of communities, not only from local citizen, colleagues students and so on. Likely some other programs, BLT/BLS has faces many problems in the region. These program haven't conducted with local people needs. The condition has brought some social conflicts due uneffective communication activity. Based on that, the aim of the research is to identify the real characteristic of northern people characteristic, which include knowing their daily activities. Based on that information, we would like to give our recommendation of BLT/BLS Socializing program to northern Aceh people. Furthermore, we had conduted an indepth interview and doing a field survey to get an opinion leader as a tool in socializing the BLT/BLS program.

Keywords: BLT/BLS, Socializing, BLT Market, northern Aceh

Abstraksi

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Seperti kebanyakan program berskala besar lainnya, BLT juga tidak luput dari persoalan-persoalan teknis di tingkat lokal. Mekanisme program yang dirancang tidak cukup memadai untuk mengakomodasi keanekaragaman karakteristik dan tuntutan lokal. Di tingkat inilah seringkali muncul benturan yang menjurus pada konflik social.konflik terjadi disebabkan oleh terjadinya komunikasi yang tidak tepat pada sasaran. Berdasarkan pada hal itu, riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik masyarakat di Aceh utara dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk menciptakan rekomendasi strategi sosialisasi program BLT di Aceh Utara. Pengamatan dan wawancara dilakukan, sehingga karakter hidup dengan adanya satu opinion leader dijadikan sebagai media informasi terkait BLT.

Kata kunci: BLT/BLS, Sosialisasi, Warung BLT, Aceh Utara

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT-RTS pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab social bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan Rumah Tangga Sasaran yang pasti merasakan beban yang berat dari kenaikan harga BBM. Tujuan dari Program BLT-RTS dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi; 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Departemen Sosial 2008).

Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut. Kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen.

Pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan meluncurkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) Plus. Program BLT Plus dilaksanakan untuk melanjutkan program pemberantasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Apa yang dimaksud dengan BLT Plus? BLT Plus adalah bantuan subsidi langsung sebesar Rp 100.000,- per bulan untuk rumah tangga miskin yang di berikan tiga bulan sekali. Tidak hanya mendapatkan bantuan uang tunai, rumah tangga miskin juga mendapatkan bantuan berupa minyak goreng dan gula. Penyaluran di lewatkan PT pos Indonesia di kantor cabangnya. Kebijakan pemberian BLT bagi rumah tangga miskin diharapkan dapat menekan peningkatan proporsi penduduk miskin. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketepatan sasaran adalah 100%, tingkat kemiskinan (17,9%) masih lebih tinggi daripada keadaan sebelum kenaikan harga BBM (16,7%).

Sepintas, program BLT Plus adalah salah program yang tepat sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM. Alasan logis yang digunakan pemerintah adalah subsidi harus diberikan kepada sasaran yang tepat. Subsidi BBM, dalam hal ini termasuk subsidi yang tidak tepat sasaran untuk rakyat miskin. Pengguna BBM, khususnya bensin dan solar, banyak juga didominasi kalangan menengah ke atas dan kalangan atas. Kita tentu masih ingat dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005. BLT diberikan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM

pada Oktober 2005. Besarnya bantuan adalah sama dengan rencana bantuan yang akan disalurkan dengan BLT Plus.

Dasar utama rencana kenaikan harga BBM adalah besarnya dana yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM akibat kondisi global. Kondisi global adalah terjadinya kenaikan harga minyak bumi. Harga minyak bumi sudah menyentuh US \$ 120 per barel, jauh dari asumsi pemerintah sebesar US \$ 95 per barel. Tidak hanya asumsi harga minyak bumi yang terganggu. Pemerintah juga berencana merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi tahunan, nilai SBI Rate dan kurs rupiah terhadap dollar AS. Upaya penghematan BBM adalah salah satu upaya untuk mengamankan APBN 2008. Jika tidak dilakukannya penyesuaian harga BBM dalam negeri, APBN yang merupakan salah satu pilar perekonomian menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan runtuhnya kepercayaan pasar yang pada gilirannya berakibat pada merosotnya perekonomian nasional. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 30 persen telah memicu kepanikan dari masyarakat. Kepanikan dalam bentuk lain adalah terjadinya antrian di stasiun pom bensin.

Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan menengah dan atas. 20% masyarakat kelompok terkaya menikmati hampir 50% subsidi BBM. Sementara 20% masyarakat termiskin hanya menikmati 5,15% subsidi BBM. Selain itu dengan semakin besarnya subsidi BBM mengakibatkan

berbagai program untuk masyarakat miskin menjadi tidak mungkin dilaksanakan.

BLT dianggap sebagai suatu cara pemerintah untuk membujuk dan merayu rakyatnya yang kurang mampu agar tidak memberontak dan melakukan demonstrasi. Soal BLT sendiri sebenarnya sudah sering dibahas melalui media massa oleh mereka-mereka yang dianggap lebih terhormat juga oleh mereka yang lebih ahli atau merasa lebih ahli. Singkatnya, banyak sekali timbul pro dan kontra mengenai BLT ini.

Kita tahu BLT mulai dicairkan kembali diberbagai daerah di Indonesia. BLT merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meringankan bebas masyarakat (bawah) dengan adanya kenaikan BBM karena pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah. Selain BLT sebenarnya ada bentuk kompensasi BBM lainnya untuk masyarakat yaitu bantuan kesehatan gratis, penyediaan beras murah untuk rakyat miskin, dan bantuan kredit bagi masyarakat

Tingkat kemiskinan akan semakin tinggi jika tingkat ketepatan semakin rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran sangat menentukan dampak BLT terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, masalah ketepatan sasaran sendiri dipengaruhi oleh mekanisme penentuan/identifikasi sasaran. Mengingat sasaran program adalah rumah tangga miskin, kriteria dan mekanisme penentuan atau pengukuran kemiskinan menjadi sangat penting, walaupun konsep dan

pengukuran kemiskinan itu sendiri masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Pengukuran kemiskinan dapat dibedakan dalam dua tingkatan, ukuran kemiskinan makro dan mikro.

Ukuran kemiskinan makro biasanya diperlukan untuk penargetan wilayah. sedangkan ukuran kemiskinan mikro dibutuhkan untuk sasaran rumah tangga/keluarga. Pemetaan kemiskinan, baik yang dihasilkan oleh BPS untuk seluruh wilayah Indonesia menyediakan ukuran-ukuran kemiskinan untuk berbagai tingkatan wilayah dari provinsi sampai dengan desa kelurahan, yang merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan penargetan kewilayahan. Sedangkan untuk pengukuran kemiskinan mikro, yaitu rumah tangga/keluarga, dibutuhkan suatu kriteria operasional yang dapat dengan mudah digunakan untuk mengidentifikasi siapa dan bagaimana orang miskin. Untuk tujuan tersebut, umumnya digunakan pendekatan karakteristik rumah tangga.

Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Namun, untuk penentuan sasaran penerima program BLT kali ini, digunakan kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peluncuran program BLT yang sentralistik dan bertujuan untuk mengurangi himpitan masalah ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin akibat lonjakan harga BBM tak ayal menimbulkan kendala-kendala tersendiri di tingkat lokal. Skalanya

yang meluas dan strukturnya yang amat vertikal dan sentralistik memberikan implikasi tertentu pada tingkat penerapannya. Seperti kebanyakan program berskala besar lainnya, BLT juga tidak luput dari persoalan-persoalan teknis di tingkat lokal. Mekanisme program yang dirancang tidak cukup memadai untuk mengakomodasi keanekaragaman karakteristik dan tuntutan lokal. Di tingkat inilah seringkali muncul benturan yang menjurus pada konflik sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Menyiapkan Strategi Sosialisasi Pembagian BLT/ BLS

1) Aceh Utara

Aceh Utara hingga tahun 2006 memiliki 850 desa, yang terbagi ke dalam 56 buah mukim. Sebanyak 780 buah desa berada di kawasan dataran dan 72 desa di kawasan berbukit. Desa yang terletak di daerah berbukit dijumpai di 12 kecamatan. Yang paling banyak desanya di kawasan perbukitan adalah di Kecamatan Sawang, Syamtalira Bayu, Nisam, Kuta Makmur, dan Muara Batu. Di samping itu, terdapat 40 buah desa yang berada di kawasan pesisir. Aceh Utara yang beriklim tropis, musim kemarau berlangsung antara bulan Februari sampai Agustus, sedangkan musim penghujan antara bulan September sampai Januari. Suhu dimusim kemarau rata-rata 32.8°C dan pada musim penghujan rata-rata 28°C. Flora dan fauna, flora yang

terdapat di daerah ini terdiri dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lain; kayu merbau, damar, damar laut, semantok, meranti, cemara, kayu bakau, rotan dan sebagainya. Semua jenis tumbuh-tumbuhan hidup subur dikawasan hutan merupakan kekayaan dan potensi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi jika mampu dikelola dengan baik tanpa merusak kelestarian alam dan lingkungan. Sedangkan fauna, Aceh Utara juga memiliki kekayaan dengan berbagai jenis hewan liar seperti gajah, harimau, badak, rusa, indus kijang, orang hutan, babi, ular dan lain-lain sebagainya (www.acehutara.go.id)

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 di Kabupaten Aceh Utara (Angka Sementara) berjumlah 529.746 jiwa yang terdiri dari 262.101 jiwa penduduk laki-laki dan 267.645 jiwa penduduk perempuan. Dari hasil tersebut penduduk terbanyak berada di kecamatan Lhoksukon, yaitu 43.902 jiwa, di urutan kedua kecamatan Dewantara yaitu 43.409 jiwa dan urutan ketiga kecamatan Tanah Jambo Aye yaitu 39.025 jiwa, sementara itu kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Geureudong Pase yaitu 4.439 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki dan penduduk perempuan dapat dilihat dari sex ratio yaitu 97,93 persen. Ini berarti dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. Dari 27 kecamatan

yang ada di kabupaten Aceh Utara, hanya 4 kecamatan yang didominasi oleh penduduk laki-laki, yaitu kecamatan Simpang Keuramat (102,60%), Geureudong Pase (101,77%), Langkahan (102,82%), dan Dewantara (100,12%). Dari hasil SP2010 angka sementara, untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten Aceh Utara jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk Aceh-Nias 2005 sebesar 1,52 persen (BPS Aceh Utara 2010). Jumlah Kecamatan adalah sebanyak 27 kecamatan, sebagai berikut:

1. Muara Batu	10. Meurah Mulia	19. Samudra
2. Dewantara	11. Syamtalira	20. Tanah Pasir
3. Sawang	Bayu	21. Syamtalira
4. Nisam	12. Matang Muli	Aron
5. Nisam antara	13. Pirak Timu	22. Lapang
6. Banda Baro	14. Paya Bakong	23. Baktiya
7. Kuta Makmur	15. Cot Girik	24. Baktiya Barat
8. Simpang	16. Lhoksukon	25. Seunoddon
Keuramat	17. Tanah Luas	26. Tanah Jambo
9. Geurudung Pase	18. Nibong	Aye
		27. Langkahan

Jumlah Mukim adalah sebanyak 70 Mukim, jumlah desa sebanyak 852 desa. Jumlah Kepala Keluarga 115.506 KK. Luas Area 3.296,86 KM². Jumlah penduduk total 526.706 jiwa. Jumlah penduduk miskin 229.667 jiwa (sumber: BPS Aceh Utara).

2) Pola pemukiman di aceh

Sejak lama disadari bahwa sistem sosial dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola tata ruang permukiman di Aceh. Pola tata ruang permukiman tradisional Gampong Lubuk Sukon yang terbentuk akibat pengaruh sistem sosial budaya masyarakatnya. Konsep keruangan makro yang terbentuk dari tatanan fisik lingkungan hunian memperlihatkan adanya pembagian ruang permukiman berdasarkan guna lahan, yaitu tempat hunian di bagian tengah Gampong (tumpok), fasilitas umum di bagian agak luar dari Gampong (ujong), dan lahan pertanian di bagian luar area permukiman (blang). Pada struktur ruang yang terbentuk, meunasah menjadi pusat orientasi Gampong. Pada skala yang lebih mikro, pola tata ruang permukiman masyarakat Gampong Lubuk Sukon terbentuk berdasarkan sistem kekerabatan dari pihak perempuan. Dalam hal ini, rumah orangtua menjadi bangunan inti (pusat) dari kelompok hunian suatu keluarga. Selanjutnya, dalam tataran rumah

dan pekarangan, *seuramoe keue* (serambi depan) menjadi pusat dari bangunan rumah Aceh. Struktur ruang pada rumah Aceh menunjukkan dualisme antara ajaran Islam yang cenderung patriarkal, dengan adat peunulang Aceh yang bersifat matriarkal.

Salah satu contoh bentuk tata ruang pemukiman di suatu Gampong di Aceh, yang bernama Lubuk Sukon. Pembagian ruang di *Gampong* Lubuk Sukon sesuai dengan tata peletakan elemen ruang permukiman tradisional, yaitu sebagai berikut:

a) Kawasan permukiman

Terdiri dari rumah-rumah dan *meunasah*, berada di wilayah *tumpok* yang memusat di tengah-tengah *Gampong* Lubuk Sukon. Perkembangan kawasan permukiman, berupa rumah-rumah baru dan tambahan fasilitas umum, berada di wilayah *ujong*, yaitu kawasan yang terletak di antara *tumpok* dan *ujong*. Keberadaan kawasan *ujong* tidak terlepas dari bentuk asal dari *Gampong* Lubuk Sukon yang merupakan sebuah pemukiman yang tertutup. *Gampong* dikelilingi pagar tanaman dan semak belukar, untuk melindungi kawasan *tumpok*. Pada area *tumpok* dan *ujong*, tiap individu mengenal secara personal elemen-elemen lingkungan dan komunitas yang ada di dalamnya. Dalam Al-Hadist yang juga tercantum dalam

Hadih Maja Kesultanan Aceh Darussalam, wilayah *tumpok* dan *ujong* merupakan satuan lingkup lingkungan yang disebut *haraat*.

b) Lahan usaha,

Dalam hal ini peruntukan lahan pertanian, berada di luar wilayah permukiman, yaitu *blang*.

c) Ruang budaya, Berdasarkan aktivitas harian Hasil kuisisioner, teridentifikasi bahwa kegiatan harian penduduk *Gampong* Lubuk Sukon sebagai muslim masih dalam lingkup lingkungan atau masih dalam lokasi *Gampong*. Secara mingguan, aktivitas yang dilakukan bisa mencakup *home range* pada tingkatan Mukim dan Kecamatan, bahkan kota lain.

Area yang paling sering dipakai adalah *meunasah* sebagai pusat aktivitas, tempat kerabat sebagai tempat bersosialisasi antar masyarakat, dan sawah/ladang, sebagai tempat bekerja.

Berdasarkan ritual, Tempat dan cakupan ruang dalam peristiwa ritual yang ada di *Gampong* Lubuk Sukon pada dasarnya beragam, serta menunjukkan adanya penggunaan ruang yang tetap maupun temporal. Gambaran bahwa masyarakat masih sangat memegang teguh kepercayaan dan agama Islam, tampak pada keberadaan *meunasah* yang menjadi tempat pelaksanaan ritual tetap,

karena sudah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Melalui pelaksanaan ritual terkait daur hidup, seperti kelahiran, paling banyak muncul adalah ruang temporal. Sebaliknya pada pelaksanaan ritual keagamaan seperti Maulud Nabi Muhammad, ruang ritual bersifat permanen, karena peristiwanya rutin dilaksanakan sekali setahun, berskala *Gampong* dan Mukim, bertempat di *meunasah*.

Keseluruhan ritual yang dilakukan masyarakat, baik di dalam kegiatan sehari-hari maupun pada ritual berdasarkan kepercayaan, selalu menggunakan ruang-ruang dalam permukiman.

fungsi *meunasah* mempunyai hirarki yang lebih tinggi, karena aktivitas yang terjadi di dalamnya merupakan aktivitas inti, yaitu shalat dan ritual-ritual kebudayaan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat *Gampong Lubuk Sukon. Tumpok* menjadi *linkage* dari pusat orientasi *meunasah*, dipengaruhi oleh masyarakat *Gampong Lubuk Sukon* yang sangat erat kekerabatannya, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan hablumminannaas selalu melibatkan kerabat. Struktur dan hirarki ruang permukiman *Gampong Lubuk Sukon*, dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Meunasah*, sebagai pusat aktivitas. Elemen tempat ibadah ini merupakan simbol pemersatu penduduk

Gampong, karena fungsinya dimanfaatkan oleh semua penduduk dalam satu *Gampong*. Selain digunakan untuk kegiatan yang bersifat ibadah seperti shalat, pengajian dan perayaan keagamaan, *meunasah* juga digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk bermusyawarah atau membicarakan permasalahan *Gampong*. Tempat ibadah ini mempunyai hirarki yang disesuaikan dengan kapasitas dan jangkauan pelayanan yang dapat ditampung, yaitu *meunasah* pada tingkatan *Gampong* dan mesjid pada tingkatan mukim.

- b) Tempat kerabat, sebagai tempat bersosialisasi antar masyarakat. Pada ruang kerabat ini, penduduk secara personal mengenal tiap anggota komunitasnya. Kedekatan masyarakat *Gampong* Lubuk Sukon didasarkan pada hubungan darah/saudara, yaitu kekerabatan batih atau keluarga besar. Bentuk sosialiasi ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan daur hidup, misalnya untuk sekedar bersilaturahmi, memenuhi undangan kelahiran dan perkawinan, menjenguk dan membantu yang terkena musibah, dan lain sebagainya.
- c) Sawah/ladang, sebagai tempat bekerja. Ruang ini menjadi bagian dari *core area Gampong* Lubuk Sukon, berkaitan dengan jumlah penduduknya yang sebagian

besar bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, sawah/ladang juga menjadi tempat masyarakat melakukan ritual *Kanduri* Blang sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen mereka.

Karakteristik sosial budaya masyarakat Gampong Lubuk Sukon ditinjau dari unsur-unsur kebudayaan, berpengaruh pada bentukan pola tata ruang permukiman tradisional. Pada kelembagaan pemerintahan terdapat struktur atau hierarki yang berlaku, dimulai dari kepemimpinan imeum mukim pada tingkatan Mukim, keuchik pada tingkatan Gampong, hingga Kasun pada tingkatan Dusun (Darul). Masing-masing kepemimpinan dibagi berdasarkan hierarki ruang dari makro hingga ke mikro. Selain itu, terdapat struktur kepemimpinan yang sesuai dengan pembagian pemanfaatan ruang.

Keuchik sebagai kepala permukiman, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat Gampong, sedangkan untuk pemanfaatan kawasan pertanian ditangani oleh keujruen blang. Aktivitas kelembagaan di Gampong Lubuk Sukon menciptakan fungsi pada ruang-ruang yang digunakan, yang memperlihatkan sifat dan hierarkinya dalam ruang permukiman. Pola tata ruang yang khas, terbentuk oleh sistem waris peunulang dan adat menetap nikah matriloal,

juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di Gampong Lubuk Sukon (Burhan, Meidiana 2008)

3) Kemiskinan

Kemiskinan dalam hal ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Statistik Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara

Garis Kemiskinan (Rp)	186.286	218.970	229.538
Penduduk Miskin (%)	33,16	27,56	25,29

Dengan melihat tabel diatas dapat dikatakan bahwa persentase penduduk miskin untuk kabupaten Aceh Utara masih tergolong tinggi yaitu sebesar 25,29% dengan jumlah penduduk 126.590 jiwa (BPS Aceh Utara 2010)

4) Proses sosialisasi

a) *Pengajian di tingkat gampong,*

Istilah ‘pengajian’ dibentuk dari kata kerja ‘mengaji’ yang berarti mempelajari ilmu agama melalui seseorang yang dianggap sebagai ahli

agama. Kegiatan mengaji pada umumnya dilakukan secara berkelompok sehingga pengajian dapat didefinisikan sebagai perkumpulan informal yang bertujuan mengajarkan dasar-dasar agama kepada masyarakat umum. Pengajian kadang-kadang juga dianggap sebagai usaha Islamisasi dalam suatu masyarakat yang membedakannya dari pendidikan di pesantren yang memberikan pelajaran khusus untuk konsumsi para elite dan kader pemimpin masyarakat pedesaan.

Masyarakat di wilayah Aceh adalah masyarakat yang kental dan dekat dengan syariah Islam, dan mayoritas masyarakat di wilayah tersebut adalah beragama Islam. Pengajian merupakan suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Aceh, khususnya Aceh Utara (Abdullah 2002)

Pengajian dipilih karena merupakan salah satu bentuk kearifan local yang telah lama berlangsung di wilayah Aceh, bahkan beberapa bulan yang lalu, dibuat suatu program pemerintah yang berupa pencanangan “gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji” yang dilaksanakan langsung oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu tanggal 24 Juli 2011 bersama oleh

jajaran pemerintah Aceh, yaitu gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Gubernur Aceh tersebut menyampaikan bahwa terdapat dua hal yang penting. pertama sebagai wujud dukungan penuh pemerintah dan rakyat Aceh terhadap gerakan moral “gemmar Mengaji” yang dicanangkan menteri Agama RI, dan yang kedua sebagai tindak lanjut dari keprihatinan pemerintah aceh terhadap nyaris hilangnya kearifan local msyarakat yang selama ini diwariskan secara turun temurun, yaitu aktifitas mengaji setekah maghrib (Madny 2011).

b) *Komedian Aceh bersifat live,*

Disampaikan melalui media massa seperti hal nya radio. Mae Pong dan Cut Nisa merupakan komedian yang biasanya membawakan pertunjukkan lawak secara langsung. Antusiasme masyarakat Aeh terhadap komedian inipun sangat tinggi. Selain Mae Pong dan Cut Nisa, ada juga komedian lain yang dipakai dalam sosialisasi ini, yaitu Empang Breuh. Selain dibuat dalam bentuk live, juga akan dibuat program rekamannya yang akan ditayangkan di TV publik yaitu TVRI Aceh.

c) *Panton Aceh,*

Salah satu bentuk karya sastra yang masih disukai oleh sebagian besar masyarakat Aceh. Melalui panton akan disampaikan materi sosialisasi tentang program

Warung BLT ini. Sehingga nantinya diharapkan akan ada interaksi maupun ketertarikan pendengar panton tentang warung BLT ini.

d) *Sosialisasi melalui media massa,*

Adapun radio yang digunakan adalah: Radio komunitas, radio komersil dan radio publik (Radio Republik Indonesia). Bentuk sosialisasi adalah dengan bentuk iklan, acara hiburan dan program talkshow.

e) *Sosialisasi dengan media cetak,*

Media cetak yang dimaksud adalah berupa poster, spanduk dan sebaran kertas brosur yang disebarakan secara langsung ke masyarakat. Bisa dengan pembagian dan meletakkannya di tempat-tempat strategi.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pada kearifan lokal dan struktur pemukiman, maka proses sosialisasi akan mengambil tempat seperti dijelaskan, yaitu pada *Meunasah*, sebagai pusat aktivitas. Elemen tempat ibadah ini merupakan simbol pemersatu penduduk *Gampong*, karena fungsinya dimanfaatkan oleh semua penduduk dalam satu *Gampong*. Selain digunakan untuk kegiatan yang bersifat ibadah seperti shalat, pengajian dan perayaan keagamaan, *meunasah* juga digunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk bermusyawarah atau membicarakan permasalahan *Gampong*.

Tempat ibadah ini mempunyai hirarki yang disesuaikan dengan kapasitas dan jangkauan pelayanan yang dapat ditampung, yaitu *meunasah* pada tingkatan *Gampong* dan mesjid pada tingkatan mukim. Tentunya pada waktu pengajian yang juga memiliki saat rutin. Bisa harian, mingguan maupun bulanan.

Pola pembagian BLT yang berlangsung di wilayah Aceh Utara, adalah sebagai berikut:



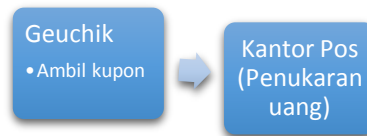
A. Rekomendasi

1. Penggantian uang tunai BLT menjadi voucher belanja kebutuhan pokok di Gampong atau desa.
2. Proses Pemilihan tempat-tempat penukaran voucher (warung atau kedai) yang ditentukan dalam rapat tingkat gampong

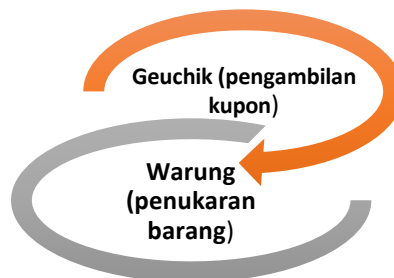
3. Kedai yang terpilih menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah.
4. Masyarakat dapat menukarkan voucher belanja kebutuhan pokok di kedai atau warung manapun

Materi sosialisasi yang akan digunakan dalam bentuk baru adalah sebagai berikut:

Sistem Lama,



Sistem baru:



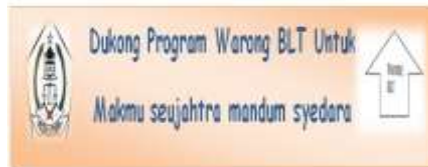
Berdasarkan pada sosialisasi, maka ada juga materi sosialisai yang akan diisi dengan keterangan dari kebijakan yang telah dibuat berdasarkan pada penglihatan pada

kebutuhan masyarakat gampong di Aceh pada bantuan yang diberikan. Yaitu ketika kupon yang sudah didapatkan, dapat ditukar langsung pada warung-warung yang sudah ditentukan sebagai tempat penukaran bantuan langsung.

B. Bentuk-bentuk Sosialisasi

1). Spanduk

Adapun bentuk spanduk yang akan dipasang dalam sosialisasi program warung BLT, adalah seperti berikut ini:



2). Poster yang akan ditempekan, dengan bentuk sebagai berikut:



3). Iklan warung BLT yang akan disiarkan melalui berbagai radio.

Adapun contoh dari iklan radio ini, meliputi jingle dan contoh iklan *adlips*. Jingle akan berbentuk seperti berikut ini:

“Warung BLT, Menjawab Kebutuhan Warga”

Sedangkan untuk bentuk iklannya, adalah dibuat dalam bentuk ada sebuah dialog dengan seting-an yang merupakan percakapan antara warga dan pemilik warung yang ditunjuk dengan label ‘warung BLT’. Adapun bentuk dialog iklan adalah:

Person 1: “Hai bu, saya sangat repot jauh melangkah menukarkan voucher ini dengan uang, harus ke kantor pos, jauh....”

Person 2: “kenapa jauh2 bu, langsung saja ke warungku. Warung saya bisa terima voucher ibu langsung dengan barang yang dibutuhkan...”

Person 1: “Bagaimana saya bisa mendapatkannya?...”

Person 2: “kupon dapat langsung diambil di kepala desa atau kelurahan, nah setelah itu bawa saja kesini....”

Person 1: “ barang apa saja yang bisa saya dapatkan?”

Person 2: “barangnya macam-macam, sembako dan lainnya... katalog barang-barang tersedia di warung saya atau warung lain yang berlabel “Warung BLT”... tinggal nunjuk ajaa, belanja jadi lbh okey”

4). Pengajian

Dalam pengajian, akan disampaikan bahwa program BLT ini adalah wujud dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Sehingga warga hendaknya bersyukur atas segala yang diperoleh atau diberikan. Dan dengan rasa syukur yang ada, insya Allah kenikmatan akan dirasakan lebih oleh warga seperti adanya rasa kesejahteraan.

Allah menggantungkan tambahan nikmat dengan syukur. Dan tambahan nikmat dari-Nya itu tiada batasnya, sebagaimana syukur kepada-Nya. Allah berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّتْ رُءُوسُكُمْ لَمَّا لَمْ يَنْصُرْكُمْ شُكْرُكُمْ فَزِيدَكُمْ لَيْسًا
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ لَشَدِيدٍ ﴿٧﴾

Dengan bersyukur akan selalu ada tambahan nikmat. Ada peribahasa mengatakan, ‘jika kamu tidak melihat keadaanmu bertambah, maka bersyukurlah.

5). Pertunjukkan *Live*,

Pertunjukkan yang berbentuk panggung komedi khas masyarakat Aceh. Pertunjukan ini sangat populer di kalangan masyarakat di Aceh, sehingga dengan penampilannya diharapkan dapat tersampaikan pesan tentang warung BLT ini. Dalam pertunjukan ini akan

dibuat tema ***“Roadshow Komedian Menuju Warung BLT”***

- 6) Isi pantun yang menjadi bahan sosialisasi, adalah digunakan pesan-pesan tentang warung BLT namun dalam bentuk pantun. Bentuknya pun pesan-pesan yang akan disampaikan dalam program Pantun Aceh, adalah seperti berikut:

Air hujan menyuarakan gemericik
Sesaatpun bagai di pantai
Mari beramai-ramai ke geuchik
Saatnya ambil kupon BLT

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2002. *Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya*”, Humaniora Volume XIV No. 3/2002
- BPS Aceh Utara. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Utara*. Aceh Utara: BPS Kabupaten Aceh Utara.
- Burhan, Meria, Antariksa & Meidiana, Christia. 2008. *Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong*. arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 3. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Malang: Universitas Brawijaya
- El madny, usamah. 2011. *Tabangun Aceh, Mengaji Ba'da Maghrib, Kearifan Lokal yang Nyaris Punah*, , edisi 16 Tahun ke-2 Agustus 2011.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, diakses melalui www.acehutama.go.id.
- Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program BLT Lintas Kementerian dan Lembaga. 2008. *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran*. Departemen Sosial Republik Indonesia